

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Novel Coronavirus atau yang akrab disebut dengan istilah Covid-19 telah mengagetkan seluruh dunia sejak Desember 2019 lalu. Tiga bulan sejak kasus pertamanya di Wuhan, Covid-19 resmi ditetapkan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena laju penyebaran dan tingkat keparahannya yang tinggi (tempo.co, 2020). Indonesia mengumumkan kasus pertama positif Covid-19 pada Maret 2020 lalu dan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia sejak itu terus meningkat hingga setahun kemudian. Terhitung per 17 Maret 2021, angka kasus positif di Indonesia berjumlah sebanyak 1.437.283 orang dengan angka kematian sebanyak 38.915 orang (corona.jakarta.go.id, 2021).

Dalam upaya mencegah dan menghadapi virus corona yang semakin meningkat dan meluas penyebarannya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memerintahkan Menteri Kesehatan untuk mengawasi secara detail terkait perkembangan virus corona di Indonesia (tribunnews.com, 2020). Dalam menangani segala urusan pemerintah terkait dengan bidang kesehatan Indonesia, presiden dibantu oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2016, Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya memiliki beberapa fungsi

yang terkait dengan kebijakan, administrasi, penelitian, pengembangan, pemberdayaan, pengelolaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dalam bidang kesehatan di Indonesia (kemkes.go.id, 2014). Berdasarkan fungsinya tersebut, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab menjadi garda terdepan dalam penanganan hal-hal yang terkait dengan kesehatan masyarakat Indonesia, termasuk Covid-19.

Kementerian Kesehatan dalam menjalankan fungsinya menangani pandemi Covid-19 tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama dengan tiga lembaga lainnya dengan bantuan dan dukungan dari sekretariat yang berkedudukan di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) (kompas.com, 2020). Susunan lembaga ini kemudian berkembang, berganti, dan semakin dirampungkan dengan dibentuknya Komite Kebijakan yang membawahi dua Satuan Tugas (Satgas) yakni Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (tribunnews.com, 2020).

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia sejak sebelum dibentuknya Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia sudah mulai menyebarkan informasi terkait perkembangan terkait Covid-19 sejak Januari 2020. Melalui *website* resmi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yang dapat dilihat pada gambar 1.1, pemerintah merilis berbagai macam informasi Covid-19 mulai dari penyebarannya di berbagai negara lain, sosialisasi mengenai kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi Covid-19, hingga rilis berita terkait tindakan antisipatif yang dilakukan seperti menyediakan *thermoscanner* di berbagai titik di Indonesia, evakuasi

kedatangan WNI dari luar negeri, dan lain sebagainya (kemkes.go.id). Namun, upaya awal pemerintah dalam menghadapi virus corona ini dinilai kurang serius, terlambat, tidak terbuka, serta tidak cukup efektif sebagai persiapan dalam menghadapi Covid-19 di Indonesia (tempo.co, 2020).

Gambar 1.1 Rilis Berita Kemenkes pada Awal Tahun Terkait Covid-19



Sumber: kemkes.go.id, 2020

Berdasarkan hasil analisis suatu jurnal mengenai kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia (Agustino, 2020), pemerintah dinilai tidak memiliki “*sense of crisis*” dalam langkah awal penanganan virus Covid-19 di Indonesia. Pemerintah dinilai terlalu santai dan menganggap remeh penyebaran virus Covid-19 masuk ke Indonesia. Disaat berbagai negara lain sudah menerapkan *lockdown* dan berbagai kebijakan lain

untuk menekan angka kasus positif Covid-19, pemerintah malah melihat hal ini sebagai peluang bagi pariwisata Indonesia. Pemerintah mempromosikan wisata Indonesia dengan mengeluarkan dana sebesar Rp298,5 miliar untuk menarik para wisatawan ke Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam langkah awalnya, pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kesehatan dan penanganan Covid-19 di Indonesia sudah lalai dalam memprioritaskan kesehatan masyarakat dalam keadaan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Dalam menanggapi isu-isu terkait Covid-19 sebelum munculnya kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia, menteri kesehatan dr. Terawan, selaku pihak Kementerian Kesehatan yang ditunjuk presiden untuk menangani dan mengkomunikasikan segala urusan terkait dengan Covid-19 di Indonesia, cenderung bersikap santai. Ketika ditanyai oleh awak media pada Januari 2020, Ia mengatakan bahwa virus corona masih belum jelas adanya. Ia menegaskan bahwa tidak ada virus corona seperti info yang beredar di masyarakat, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan terkait dengan Covid-19 (kompas.com, 2020). Namun, keterlambatan dan sikap terlalu 'santai' Indonesia dalam mendeteksi kasus Covid-19 tidak hanya menjadi bahan pembicaraan di masyarakat namun juga menarik perhatian media luar.

Salah satu media internasional, The Sydney Morning Herald, mengungkapkan dalam salah satu artikelnya bahwa Indonesia tidak melakukan tindakan yang cukup dalam upaya mendeteksi kasus positif Covid-19. Pada 11 Februari 2020, Kedutaan besar Amerika Serikat dan seorang profesor bernama Marc Lipsitch dari Harvard

University juga sempat menyatakan kekhawatiran atas penanganan virus corona di Indonesia karena belum juga mendeteksi satupun kasus positif Covid-19. Namun, hal ini kemudian dianggap sebagai suatu bentuk penghinaan oleh dr. Terawan selaku menteri kesehatan Indonesia (kompas.com, 2020).

Dalam pemberitaan yang dilansir Detik.com, berikut isi artikel terkait pernyataan menkes Terawan dalam menanggapi isu terkait penelitian Harvard tersebut,

"Ya Harvard suruh ke sinilah. Saya buka pintunya untuk melihat. Jadi kami tidak ada yang ditutupi, bahkan dari AS (Amerika Serikat) bisa lihat sendiri. Dan itu alat yang dipakai alat dari Anda (AS) sendiri," kata Terawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020) (news.detik.com, 2020).

Pada hari yang sama, wartawan menanyakan tanggapan Menkes Terawan mengenai opini berkembang yang mempertanyakan nihilnya kasus Covid-19 di Indonesia. Dalam menanggapi "Indonesia Kebal Corona", menkes Terawan menyampaikan bahwa nihilnya kasus Covid-19 di Indonesia merupakan hasil dari kekuatan doa dan seharusnya tidak dipertanyakan melainkan disyukuri. Ia mengatakan bahwa selain melalui doa, ia memastikan bahwa pemerintah juga melakukan berbagai bentuk pencegahan dan persiapan yang sesuai dengan standar WHO terkait dengan penanganan virus corona (kumparan.com, 2020).

Terkait dengan pemberitaan yang beredar di masa itu, rilis berita yang dipublikasikan melalui *website* resmi Kementerian Kesehatan kebanyakan berisikan

tentang upaya Kementerian Kesehatan dalam mencegah Covid-19 di Indonesia. Pada tanggal 11 Februari 2020, bertepatan dengan keluarnya pernyataan-pernyataan menkes Terawan di atas, terdapat satu rilis berita yang berjudul “Tak Ada Kasus nCov Positif di Indonesia, Begini Alur Pemeriksaan Lab Balitbangkes”. Rilis berita tersebut berisikan alur pemeriksaan Lab Balitbangkes dalam mendeteksi Covid-19 di Indonesia. Dalam rilis tersebut dijelaskan bahwa Lab Balitbangkes sudah memenuhi standar WHO dan mengikuti prosedur yang diberikan, dan berdasarkan hasil pemeriksaannya, ditemukan bahwa 62 spesimen negatif nCov dan 2 spesimen dalam proses pemeriksaan (kemkes.go.id, 2020).

Berdasarkan rilis berita tersebut, Kementerian Kesehatan seolah-olah merespon secara tidak langsung dengan mengeluarkan rilis yang berkaitan dengan opini yang tengah berkembang di masyarakat. Walaupun tidak secara langsung menyertakan tanggapan dr Terawan terkait penelitian Marc Lipsitch maupun ungkapan kebal corona karena doa, rilis berita yang dipublikasikan melalui *website* resmi Kementerian Kesehatan tersebut secara tidak langsung seolah-olah mewakili pernyataan menkes Terawan yang mengatakan bahwa penelitian Harvard tersebut dianggap menghina karena menganggap Indonesia tidak mampu mendeteksi kasus Covid-19 di Indonesia. Rilis berita tersebut menjelaskan standar pemeriksaan Covid-19 di Indonesia sudah dilakukan sesuai prosedur dan standar WHO, sehingga belum adanya kasus terkonfirmasi di Indonesia bukan merupakan aksi “menutup-nutupi” melainkan memang belum terdapat kasus Covid-19 di Indonesia. Namun, bertolak belakang

dengan pernyataan tersebut, kurang dari sebulan kemudian, tepatnya pada 2 Maret 2020, pemerintah mengumumkan kasus pertama terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia.

Munculnya kasus pertama pada awal Maret 2020 di Indonesia diliput oleh berbagai media dan mendapatkan perhatian berskala nasional. Sejak kasus pertama ini, angka terinfeksi Covid-19 terus meningkat dan menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun terbilang terlambat dalam mendeteksi kasus pertamanya dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam, Thailand dan Singapura yang sudah mendeteksi kasus Covid-19 sejak Januari 2020, pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia termasuk cepat jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya (katadata.co.id, 2020). Seperti yang terlihat pada gambar 1.2 dan 1.3, grafik perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia yang awalnya hanya menginfeksi dua orang di Jakarta dengan cepat melonjak naik dan menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Terhitung per 31 Desember 2020, angka kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia berjumlah sebanyak 743.198 orang dengan angka kematian sebanyak 22.138 orang.

Gambar 1.2 Kasus Covid-19 Harian di Indonesia



Sumber: beritasatu.com, 2020

Gambar 1.3 Jumlah Terpapar Covid-19 di Indonesia



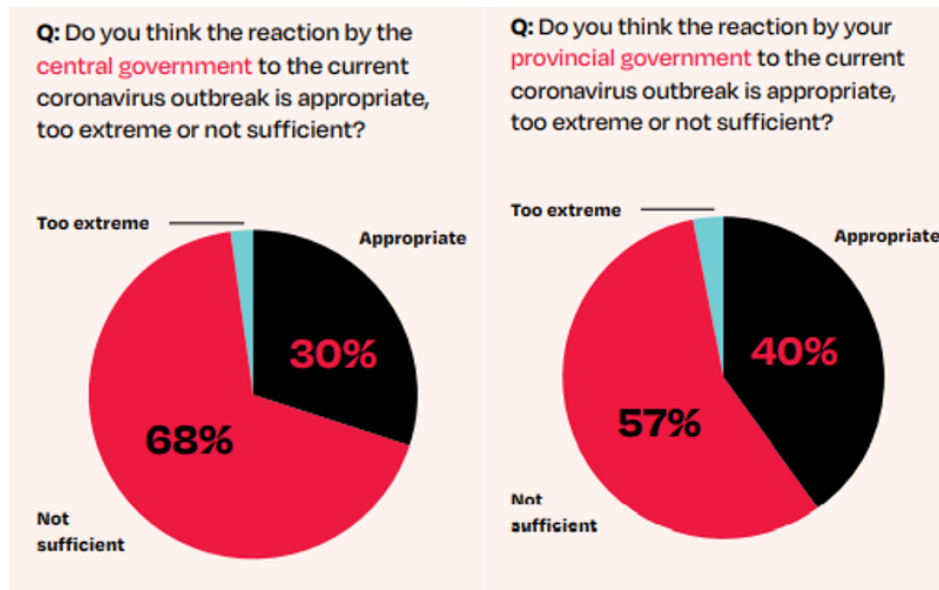
Sumber: twitter.com/bnbp_indonesia, 2020

Angka terinfeksi yang terus meningkat sejak kasus pertama di bulan Maret 2020 semakin menyebabkan kegelisahan dan keresahan di tengah masyarakat. Sikap tenang dan santai pemerintah dalam langkah awal menghadapi Covid-19 menyebabkan dampak kewalahan dan kepanikan setelah munculnya kasus positif pertama di Indonesia. Berbagai macam opini dan kontroversi terkait dengan isu pandemi Covid-19 semakin berkembang di masyarakat, mulai dari anggapan bahwa Covid-19 adalah konspirasi, komersialisasi pariwisata oleh pemerintah, ketidaksiapan dan keterlambatan pemerintah dalam penanganan, dan lain sebagainya (bbc.com, 2020; Detik.com, 2020).

Sebuah wadah perubahan sosial bernama Change.org melakukan sebuah survei yang diikuti oleh sekitar 10.199 orang dalam waktu dua hari. Survei ini dilaksanakan pada bulan Maret 2020 untuk melihat bagaimana persepsi publik terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan dalam upayanya menangani penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, mayoritas opini yang berkembang bervariasi terhadap pihak pemerintah, mulai dari presiden, BNPB, menteri kesehatan, dan kepala daerah. Mayoritas opini yang berkembang adalah keterlambatan dan kurang efektifnya pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19, serta sikap pemerintah yang terlalu meremehkan masalah seperti pada langkah awal penanganannya. Dari hasil survei juga dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih menilai positif BNPB dan kepala daerah dibandingkan dengan presiden dan menteri kesehatan (kompas.com, 2020).

Pada periode waktu April hingga Mei 2020, The World Bank Group juga melakukan pengamatan atas pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat pandangan publik terkait dengan tanggapan yang diambil oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, terkait dengan pandemi Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, 68% menganggap tanggapan pemerintah pusat dalam menghadapi pandemi Covid-19 tidak memadai dan 57% menganggap tanggapan pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19 tidak memadai. Berdasarkan hasil pengamatan ini disimpulkan bahwa mayoritas opini yang berkembang di masyarakat terhadap tanggapan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 cenderung tidak cukup baik.

Gambar 1.4 Analisis Sentimen Indonesia Covid-19 Observatory



Sumber: worldbank.org, 2020

Pada diskusi dengan topik “Komunikasi Kepemimpinan dan Krisis Mengelola Virus Corona” di UI Salemba, Jakarta, pada 11 Maret 2020, Dany Amrul Ichdan selaku Tenaga Ahli Utama Kepresidenan mengakui bahwa pemerintah masih memiliki kelemahan dalam melakukan komunikasi publik terkait dengan penanganan Covid-19 di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa kelemahan komunikasi publik tersebut terjadi pada masa sebelum Achmad Yurianto ditunjuk menjadi juru bicara pemerintah terkait penanganan Covid-19. Walaupun begitu, Ia tidak menyalahkan Menkes dr Terawan, selaku pihak yang bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan segala urusan terkait Covid-19 di Indonesia sebelum ditunjuknya juru bicara Achmad Yurianto. Menurutnya, setiap menteri memiliki *style*-nya masing-masing. (beritasatu.com, 2020). Namun, lemahnya komunikasi publik tersebut menimbulkan anggapan bahwa pemerintah kurang bertanggung jawab dan kurang transparan dalam memberikan informasi kepada publik. Hal ini kemudian menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan menimbulkan krisis kepercayaan atas segala upaya dan tindakan pemerintah terkait penanganan pandemi di Indonesia (akurat.co, 2020).

Ketika suatu lembaga atau perusahaan mengalami situasi krisis, praktisi *Public Relations* dalam suatu lembaga atau perusahaan tersebut harus mampu merespon krisis dengan cepat dan tepat guna meminimalisir dampak negatif dari krisis yang terjadi tersebut. Terdapat dua komponen yang perlu diperhatikan dalam menghadapi situasi krisis, yaitu suatu organisasi tersebut harus mempertanggungjawabkan krisis yang

terjadi dan melakukan tindakan untuk merespon krisis tersebut. Tindakan yang dilakukan harus dipertimbangkan dan memberikan dampak positif bagi suatu lembaga atau organisasi terkait (Benoit, 2015).

Berdasarkan kedua hasil survei terhadap publik terkait dengan penanganan awal Covid-19 di Indonesia di atas menunjukkan bahwa sentimen publik terhadap penanganan awal pandemi di Indonesia cenderung negatif. Sentimen negatif publik ini juga didukung oleh pernyataan Dany Amrul Ichdan di atas yang menyebutkan bahwa lemahnya komunikasi publik terkait penanganan awal Covid-19 di Indonesia menyebabkan berkembangnya anggapan dan opini terkait lemahnya transparansi dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik. Sentimen yang cenderung negatif di tengah publik terhadap penanganan awal pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 menyebabkan hilangnya kepercayaan dan partisipasi publik dalam penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dibutuhkan penanganan terhadap krisis terkait penanganan Covid-19 di Indonesia yang dialami pemerintah guna membangun kembali reputasinya di tengah publik, salah satunya adalah dengan menggunakan strategi *Image Repair*.

Dalam menghadapi krisis terdapat suatu istilah yang disebut dengan *Image Repair* yang merupakan suatu kejadian ketika suatu pihak tertentu dituduh atas suatu kesalahan dan pihak tersebut mencoba memperbaiki citranya melalui suatu pesan tertentu. Terdapat lima kategori dalam strategi *Image Repair* yaitu *denial*, *evade responsibilities*, *reduces offensiveness*, *corrective action* dan *mortification* (Benoit,

2015). Setiap strategi yang digunakan memiliki dampak yang berbeda-beda tergantung dengan krisis apa yang tengah dialami oleh suatu lembaga atau perusahaan tersebut. *Public Relations* dalam hal ini harus mampu mengidentifikasi strategi yang tepat untuk dilakukan ketika menghadapi suatu krisis tertentu agar dapat memperbaiki dan memulihkan citranya setelah terjadinya krisis.

Di tengah berbagai kritik yang dihadapi, Kementerian Kesehatan secara rutin mengeluarkan rilis berita untuk menjadi rujukan penulisan pemberitaan bagi media. Rilis berita tersebut juga dimuat dalam laman *website* Kementerian Kesehatan, sehingga dapat diakses oleh publik. *Press release* masih dianggap sebagai salah satu media yang efektif, jelas, dan persuasif untuk menginformasikan kepada publik mengenai apa yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan, produk yang dikeluarkan, dan semua hal yang dapat dijadikan pemberitaan dalam *press release* terkait dengan lembaga atau perusahaan (Seitel, 2011). Dengan mengaplikasikan strategi *Image Repair*, rilis berita dapat membantu Kementerian Kesehatan dalam upaya membangun kembali citra dan kepercayaan publiknya dengan menyampaikan berbagai informasi dan tanggapan atas krisis yang dialaminya.

Rilis berita pada periode Maret hingga akhir Mei 2020 yang dipublikasikan melalui *website* resmi kemkes.go.id kebanyakan bersifat informatif mengenai perkembangan dan upaya penanganan Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia. Kumpulan rilis berita tersebut berisikan tentang perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia, sosialisasi pencegahan Covid-19, kebijakan PSBB dan *New*

Normal, dan berbagai informasi sarana dan pra-sarana terkait dengan upaya penanganan Covid-19 di Indonesia. Namun, rilis-rilis yang dipublikasikan langsung oleh Kementerian Kesehatan melalui *website* resminya tidak secara langsung menjawab kritik dan kekhawatiran masyarakat seperti yang dimuat dalam media massa.

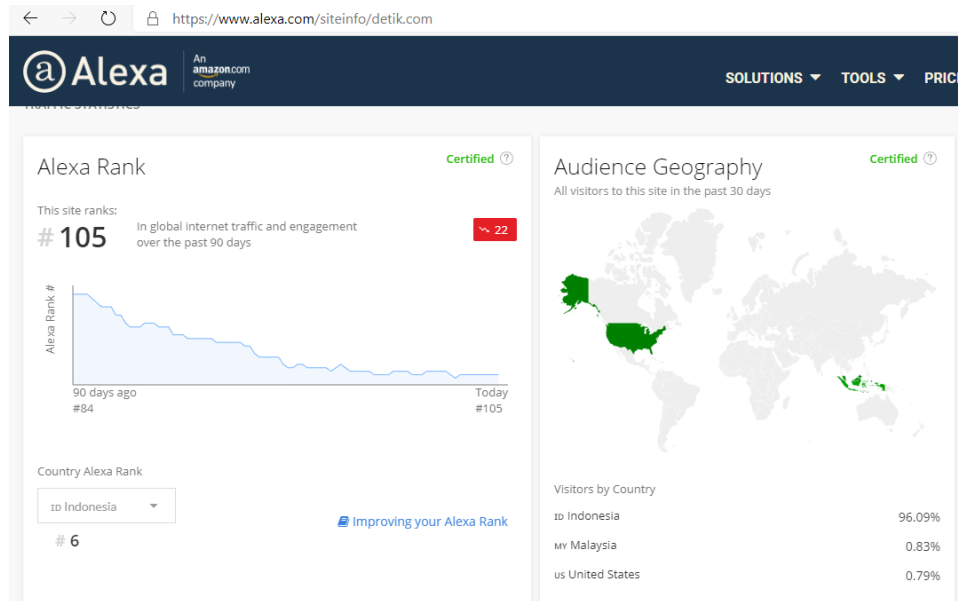
Rilis berita resmi Kementerian Kesehatan yang cenderung bersifat informatif dan kurang responsif secara ‘langsung’ terhadap isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat menjadi alasan bagi peneliti tertarik untuk menganalisa lebih mendalam mengenai isi rilis berita yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan selama periode waktu 2 Maret hingga 31 Maret 2020 untuk memahami bagaimana Kementerian Kesehatan menangani krisis kepercayaan publik yang dialaminya. Dikarenakan oleh minimnya respon langsung terhadap isu negatif yang berkembang di tengah masyarakat dalam rilis berita resmi Kementerian Kesehatan, peneliti juga melakukan analisis isi terhadap artikel pemberitaan online yang muncul terkait krisis yang terjadi guna memperoleh pernyataan-pernyataan pejabat terkait dari Kementerian Kesehatan yang tidak dimuat dalam rilis namun muncul dalam pemberitaan.

Periode waktu ditentukan berdasarkan banyaknya opini negatif yang beredar di masyarakat terkait dengan kinerja Kementerian Kesehatan terhadap langkah penanganan awal Covid-19 di Indonesia sejak munculnya kasus pertama terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia, yaitu 2 Maret 2020. Opini negatif yang berkembang dalam periode tersebut meliputi isu-isu yang terkait dengan lonjakan kasus Covid-19 di

Indonesia, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan terkait dengan Covid-19, dan pernyataan-pernyataan kontroversial pihak-pihak yang terkait dengan Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana strategi Kementerian Kesehatan dalam menanggapi beberapa krisis lainnya terkait dengan penanganan pandemi di Indonesia setelah munculnya kasus pertama Covid-19 di Indonesia melalui rilis berita resminya dan artikel pemberitaan digital.

Salah satu media yang berperan penting dan paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia di tengah situasi pandemi Covid-19 adalah situs berita *online* Detik.com. Berdasarkan analisis situs melalui Alexa.com, situs berita *online* Detik.com menempati posisi ke 6 sebagai situs yang populer di Indonesia (Site Info Detik.com, 2020). Menurut hasil pengamatan yang dilakukan oleh Kazee.id pada bulan Maret 2020, Detik.com menempati posisi kedua dalam urutan media yang memberitakan topik terkait dengan Covid-19. Hingga Desember 2020, menurut Indonesia Indicator (I2), Detik.com menempati posisi kelima dalam urutan media yang paling banyak meliput berita terkait topik Covid-19 di tahun 2020 (kompas.com, 2020). Tingginya pemberitaan terkait Covid-19 dan popularitas portal berita online Detik.com di tengah masyarakat menjadikannya pilihan portal pemberitaan yang tepat untuk digunakan artikel pemberitaannya dalam penelitian ini. Selain itu, Detik.com juga memiliki fitur pencarian dengan kurun waktu tertentu yang memudahkan peneliti untuk mencari artikel pemberitaan yang sesuai dengan penelitian ini.

Gambar 1.5 Alexa Rank situs Detik.com



Sumber: alexa.com, 2020

Oleh karena itu, situs berita *online* Detik.com dianggap relevan untuk digunakan dalam menganalisis strategi Kementerian Kesehatan yang tersirat dalam menanggapi beberapa krisis yang dialaminya setelah kasus pertama Covid-19 di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia menyebabkan berbagai kontroversi dan memunculkan opini negatif terhadap Kementerian Kesehatan yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan yang berfungsi sebagai garda terdepan pemerintah dalam bidang kesehatan Indonesia, khususnya dalam situasi

pandemi, memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, sehingga kepercayaan publik sangatlah penting.

Munculnya kasus pertama terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia telah mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah terkait dengan penanganan pandemi di Indonesia. Di tengah krisis kepercayaan publik ini, Kementerian Kesehatan masih mengalami beberapa krisis lainnya seperti kelangkaan APD di kalangan tenaga medis, lonjakan kasus Covid-19, dan pernyataan-pernyataan kontroversial para pejabat terkait dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Krisis tersebut dialami oleh Kementerian Kesehatan secara bertubi-tubi dalam kurun waktu satu bulan sejak diumumkannya kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia sehingga langkah dan strategi Kementerian Kesehatan dalam menanggapi krisis-krisis lanjutan tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menangani pandemi.

Image Repair Theory yang cukup jarang ditemukan, terutama di Indonesia, dalam penelitian terkait dengan instansi pemerintah juga menjadi salah satu alasan pentingnya penelitian ini. Penelitian *Image Repair* terkait dengan krisis serupa, khususnya pada ranah pemerintahan, kebanyakan merupakan penelitian terkait dengan virus SARS yang melanda pada awal tahun 2000-an lalu, namun berbeda situasinya dengan perkembangan media yang sudah sangat pesat sekarang ini, yang semakin memudahkan berkembangnya isu-isu negatif di tengah publik sehingga penggunaan *Image Repair*-nya pun berbeda dan lebih dibutuhkan. Oleh karena itu, penelitian ini

dilakukan untuk melihat bagaimana strategi Kementerian Kesehatan dalam menanggapi beberapa krisis yang terjadi setelah kasus pertama Covid-19 di Indonesia yang direpresentasikan melalui rilis berita dan pemberitaan dalam media online Detik.com.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana strategi *Image Repair* pemerintah dalam menanggapi krisis yang dialaminya selama satu bulan setelah munculnya kasus pertama Covid-19 di Indonesia dalam teks rilis berita Kementerian Kesehatan dan pemberitaan media online Detik.com terkait dengan penanganan Covid-19?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi *Image Repair* pemerintah dalam menanggapi krisis yang dialaminya selama satu bulan setelah munculnya kasus pertama Covid-19 di Indonesia dalam teks rilis berita Kementerian Kesehatan dan pemberitaan media online Detik.com terkait dengan penanganan Covid-19.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memperluas penelitian terkait dengan *Image Repair*, menambah kajian analisis dalam bidang komunikasi dan diharapkan agar dapat membantu bagi penelitian-penelitian mendatang terkait dengan krisis, strategi *Image Repair*, dan analisis isi, khususnya analisis isi kualitatif.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi humas pemerintahan, khususnya Kementerian Kesehatan, terkait dengan pemulihan citra suatu lembaga di tengah krisis melalui penggunaan dan pemanfaatan media baru.

1.6 Batasan Penelitian

Penelitian ini membatasi objek penelitian berupa pemberitaan hanya dalam periode 2 Maret – 31 Maret 2020 karena dianggap merupakan periode waktu ketika opini publik cenderung negatif terhadap Kementerian Kesehatan, sehingga segala krisis yang terjadi dalam periode waktu tersebut sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan.